

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

### POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN

000	UMUM	500	PEREKONOMIAN
010	Urusan Dalam	510	Perdagangan
020	Peralatan	520	Pertanian
030	Kekayaan Daerah	530	Perindustrian
040	Perpus/Dokumen/Karsipan/Sandi	540	Pertambangan/Kesamudraan
050	Perencanaan	550	Perhubungan
060	Organisasi/Ketatalaksanaan	560	Tenaga Kerja
070	Penelitian	570	Permodalan
080	Konferensi	580	Perbankan/Moneter
090	Perjalanan Dinas	590	Agraria
100	PEMERINTAHAN	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
110	Pemerintah Pusat	610	Pengairan
120	Pemerintah Provinsi	620	Jalan
130	Pemerintah Kabupaten/Kota	630	Jembatan
140	Pemerintah Desa	640	Bangunan
150	Legislatif MPR/DPR	650	Tata Kota
160	DPRD Provinsi	660	Tata Lingkungan
170	DPRD Kabupaten	670	Ketenagaan
180	Hukum	680	Peralatan
190	Hubungan Luar Negeri	690	Air Minum
200	POLITIK	700	PENGAWASAN
210	Kepartaian	710	Bidang Pemerintahan
220	Organisasi Kemasyarakatan	720	Bidang Politik
230	Organisasi Profesi	730	Bidang Keamanan/Ketertiban
240	Organisasi Pemuda	740	Bidang Kesejahteraan Rakyat
250	Organisasi Buruh, Tani, Nelayan & Angkutan	750	Bidang Perekonomian
260	Organisasi Wanita	760	Bidang Pekerjaan Umum
270	Pemilihan Umum	770	-
280	Pelanggaran Pemilu	780	Bidang Kepegawaian
290	-	790	Bidang Pekerjaan Umum
300	KEAMANAN/KETERTIBAN	800	KEPEGAWAIAN
310	Pertahanan	810	Pengadaan
320	Kemiliteran	820	Mutasi
330	Keamanan	830	Kedudukan
340	Perlindungan Masyarakat	840	Kesejahteraan Pegawai
350	Kejahatan	850	Cuti
360	Bencana	860	Penilaian
370	Kecelakaan	870	Tata Usaha Kepegawaian
380	-	880	Pemberhentian
390	-	890	Pendidikan Pegawai

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

400	KESEJAHTERAAN RAKYAT	900	KEUANGAN
410	Pembangunan Desa	910	Anggaran
420	Pendidikan	920	Otoritas/SKO
430	Kebudayaan	930	Vertifikasi
440	Kesehatan	940	Akuntansi
450	Agama	950	Perbendaharaan
460	Sosial	960	Pembinaan Kebendaharaan
470	Kependudukan	970	Pendapatan
480	Media Massa	980	-
490	-	990	Pembelajaran

### 000 UMUM Perincian Ketiga

000	UMUM	050	PERENCANAAN
001	Lambang	051	Bidang Pemerintahan
002	Tanda Kehormatan/Penghargaan	052	Bidang Politik
003	Hari Raya/Besar	053	Bidang Keamanan dan Ketertiban
004	Ucapan	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat
005	Undangan	055	Bidang Perekonomian
006	Tanda Jabatan	056	Bidang Pekerjaan Umum
007	-	057	Bidang Pengawasan
008	-	058	Bidang Kepegawain
009	-	059	Bidang Keuangan
010	URUSAN DALAM	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
011	Gedung Kantor	061	Organisasi Instansi Pemerintah
012	Rumah Dinas	062	Organisasi Badan Non Pemerintah
013	Mess/ <i>Guest House</i>	063	Organisasi Badan Internasional
014	Rumah Susuan/Apartemen	064	Organisasi Badan Semi Pemerintah
015	Penerangan Listrik/Jasa Listrik	065	Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem
016	Telepon/Faximile/Internet	066	Stempel Dinas
017	Keamanan/Ketertiban Kantor	067	Pelayanan Umum
018	Kebersihan Kantor	068	Komputerisasi/Siskomdagri
019	Protokol	069	Analisis dan Formasi Jabatan
020	PERALATAN	070	PENELITIAN
021	Alat Tulis	071	Riset
002	Mesin Kantor	072	Survai
023	Perabot Kantor	073	Kajian
024	Alat Angkutan	074	Kerjasama Penelitian
025	Pakaian Dinas	075	Departemen
026	Senjata	076	Non Departemen
027	Pengadaan	077	Provinsi
028	Inventaris	078	Kabupaten/Kota
029	-	079	Kecamatan/Desa

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

030	KEKAYAAN DAERAH	080	KOMPERENSI
031	Sumber Daya Alam	081	Gubernur
032	Aset Daerah	082	Bupati/Walikota
033	-	083	Komponen, Eselon Lainnya
034	-	084	Instansi Lainnya
035	-	085	Internasional di Dalam Negeri
036	-	086	Internasional di Luar Negeri
037	-	087	-
038	-	088	-
039	-	089	-
040	PERPUST./DOK./KEARSIPAN/SANDI	090	PERJALANAN DINAS
041	Perpustakaan	091	Perjalanan Pres./Wkl.Pres. ke Daerah
042	Dokumentasi	092	Perjalanan Menteri ke Daerah
043	-	093	Perjalanan Pejabat Daerah
044	-	094	Perjalanan Pegawai
045	Karsipan	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
046	Sandi	096	Pejalanan Pres./Wkl. Pres. ke L. Negeri
047	-	097	Perjalanan Meteri ke Luar Negeri
048	-	098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke L. Negeri
049	-	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

### 001 PEMERINTAHAN

#### Perincian Ketiga

100	PEMERINTAHAN	150	LEGISLATIF MPR/DPR
101	GDN (Gerakan Disiplin Nasional)	151	Keanggotaan DPR
102	-	152	Persidangan
103	-	153	Kesejahteraan
104	-	154	Hak
105	-	555	Keanggotaan DPR
106	-	156	Persidangan DPR
107	-	157	Kesejahteraan
108	-	158	Jawaban Pemerintahan
109	-	159	Hak
110	PEMERINTAHAN PUSAT	160	DPRD PROVINSI
111	Presiden	161	Keanggotaan
112	Wakil Presiden	162	Persidangan Kesejahteraan
113	Susunan Kabinet	153	Hak
114	Departemen Dalam Negeri	154	Sekertaris DPRD Provinsi
115	Departemen Lainnya	165	-
116	Lembaga Tinggi Negara	166	-
117	Lembaga Pemerintah Non Departemen	167	-
118	Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi	168	-
119	Kerjasama Antar Departemen	169	-

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

120	PEMERINTAHAN PROVINSI	170	DPRD KABUPATEN
121	Gubernur	171	Keanggotaan
122	Wakil Gubernur	172	Persidangan Kesejahteraan
123	Sekertaris Daerah	173	Hak
124	Badan-badan Pertimbangan Daerah	174	Sekertaris DPRD Kabupaten/Kota
125	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	175	-
126	Pembagian Wilayah	176	-
127	Penyerahan Urusan	177	-
128	Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah	178	-
129	-	179	-
130	PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	180	HUKUM
131	Bupati/Walikota	181	Perdata
132	Wakil Bupati/Walikota	182	Pidana
133	Kabupaten/Kota	183	Peradilan
134	Forum Koordinasi Pemerintah Daerah	184	Hukum Internasional
135	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	185	Imigrasi
136	Pembagian Wilayah	186	Kepenjaraan
137	Penyerahan Urusan	187	Kejaksaan
138	Pemerintah Kecamatan	188	Peraturan Perundang-Undangan
139	-	189	Hukum Adat
140	PEMERINTAH DESA	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
141	Pamong Desa	191	Perwakilan Asing
142	Penghasilan Pamong Desa	192	Tamu Negara
143	Kekayaan Alam	193	Tamu Negara
144	Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembuk Desa	194	Kerjasama Dengan Negara Asing
145	Administrasi Desa	195	Perwakilan RI di Luar Negeri
146	Kewilayahan	196	PBB
147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa	197	Laporan Luar Negeri
148	Perangkat Kelurahan	198	-
149	Dewan Kelurahan	199	-

## 200 POLITIK Perincian Ketiga

200	POITIK	250	ORGANISASI BURUH, TANI & NELAY
201	Kebijaksanaan Umum	251	Federalisasi Buruh Seluruh Indonesia
202	Orde Baru	252	Organisasi Buruh Internasional
203	Reformasi	253	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
204	-	254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
205	-	255	Keluarga Sopir Profesional Indonesia

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

206	-	256	Keluarga Sopir Profesional Indonesia
207	-	257	Gab. Peng. Ojek Seluruh Indonesia
208	-	258	-
209	-	259	-
210	KEPARTAIAN	260	ORGANISASI WANITA
211	Lambang Partai	261	Dharma Wanita
212	Kartu Tanda Anggota	262	Kongres Wanita Indonesia
213	Bantuan Keuangan Parpol	263	Pemberdayaan Perempuan (Wanita)
214	Komposisi Kepengurusan	264	Kongres Wanita
215	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	265	-
216	Tempat/Kedudukan/Alamat	266	-
217	-	267	-
218	-	268	-
219	-	269	-
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	270	PEMILIHAN UMUM
221	Berdasarkan Perjuangan	271	Pencalonan
222	Berdasarkan Kekayaan	272	Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
223	Berdasarkan Kerohanian/Agama	273	Kampanye/Dana
224	Lambang Adat	274	Petugas/Pemilih
225	Penghayatan Kepercayaan	275	Pemilih/Daftar Pemilih
226	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Yayasan	276	Sarana Logistik
227	-	277	Pemungutan suara/Perhitungan suara
228	-	278	Pengambilan Sumpah/Janji DPRD, DPL
229	-	279	Sarana Penyelenggaraan Pemilu
230	ORGANISASI PROFESI & FUNGSIONAL	280	PELANGGARAN PEMILU
231	Ikatan Profesi Kesehatan	281	-
232	Persatuan Guru Republik Indonesia	282	-
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	283	-
234	Persatuan Advokat Indonesia	284	-
235	Lembaga Bantuan Hukum	285	-
236	Korps Pegawai Republik Indonesia	286	-
237	Persatuan Wartawan Indonesia	287	-
238	Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia	288	-
239	Ikatan Pustakawan Indonesia	289	-
240	ORGANISASI PEMUDA	290	-
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia	291	-
242	Organisasi Mahasiswa	292	-
243	Organisasi Pelajar	293	-
244	Gerakan Pemuda Ansor	294	-
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia	295	-
246	Gerakan Pemuda Marhaenis	266	-
247	-	297	-

## Klasifikasi Karsipan Departemen Dalam Negeri

248 -	298 -
249 -	299 -

### 300 KEAMANAN KETERTIBAN UMUM

#### Perincian Ketiga

300	KEAMANAN/KETERTIBAN	350	KEJAHATAN
301	Ketentraman dan Ketertiban Umum	351	Makar/Pemberontakan
302	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur	352	Pembunuhan
302	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	353	Penganiayaan, Pencurian/Perampasan
304	-	354	Subversi/Penyelundupan/Narkotika
305	-	355	Pemalsuan
306	-	356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jab.
307	-	357	Perkosaan/Perbuatan Cabul
308	-	358	Kenakalan
309	-	359	Kejahatan Lainnya
310	PERTAHANAN	360	BENCANA
311	Darat	361	Gempa Bumi
312	Laut	362	Banjir
313	Udara	363	Angin Topan
314	Perbatasan	364	Kebakaran
315	-	365	Kekeringan
316	-	366	Tsunami
317	-	367	Gunung Api
318	-	368	Gerakan Tanah/Tanah Longsor
319	-	369	-
320	KEMILITERAN	370	KECELAKAAN
321	Latihan Militer	371	Darat
322	Wajib Militer	372	Udara
323	Operasi Militer	373	Laut
324	Kekayaan TNI Pejabat Sipil dari TNI	374	Sungai/Danau
325	-	375	-
326	-	376	-
327	-	377	-
328	-	378	-
329	-	379	-
330	KEAMANAN	380	-
331	Kepolisian	381	-
332	Huru-Hara/Demonstrasi	382	-
333	Senjata Api/Tajam	383	-
334	Bahan Peledak	384	-
335	Perjudian	385	-
336	Surat-surat Kaleng	386	-

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

337	Pengaduan	387	-
338	Himbauan/Larangan	388	-
339	-	389	-
340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT	390	-
341	Latihan Dasar	391	-
342	Bencana	392	-
343	-	393	-
344	-	394	-
345	-	395	-
346	-	396	-
347	-	397	-
348	-	398	-
349	-	399	-

### 400 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### Perincian Ketiga

400	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	450	AGAMA
401	Keluarga Miskin	451	Islam
402	-	452	Protestan
403	-	453	Katolik
404	-	454	Hindu
405	-	455	Budha
406	-	456	Urusan Haji
407	-	457	-
408	-	458	-
409	-	459	-
410	PEMBANGUNAN DAERAH	460	SOSIAL
411	Pembinaan Usaha Gotong Royong	461	Rehabilitasi Penderita Cacat
412	Perekonomian Desa	462	Tuna Sosial
413	Prasarana Desa	463	Kesejahteraan anak/keluarga
414	Pengembangan Desa	464	Pembinaan Pahlawan
415	Koordinasi	465	Kesejahteraan Sosial
416	-	466	Sumbangan Sosial
417	-	467	Bimbingan Sosial
418	-	468	PMI
419	-	469	Makam
420	PENDIDIKAN	470	KEPENDUDUKAN
421	Sekolah	471	Pendaftaran Penduduk
422	Administrasi Sekolah	472	Pencatatan Sipil
423	Metode Dasar	473	Informasi Kependudukan
424	Tenaga Pangajar	474	Perkembangan Penduduk
425	Sarana Pendidikan	475	Proyeksi dan Penyerasan Kab. Kepen

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

426	Keolahragaan	476	Monitoring
427	Kepemudaan	477	Evaluasi
428	Kepramukaan	478	Dokumentasi
429	Pendidikan Kedinasan	479	-
430	<b>KEBUDAYAAN</b>	480	<b>MEDIA MASA</b>
431	Kesenian	481	Peneribitan
432	Kepurbakalaan	482	Radio
433	Sejarah	483	Televisi
434	Bahasa	484	Film
435	Usaha Pertunjukan, Hiburan Kesenangan	485	Pers
436	Kepercayaan	486	Grafika
437	Cagar Budaya	487	Penerangan
438	Nilai Budaya	488	<i>Operation Room</i>
439	Perfilman	489	Hubungan Masyarakat
440	<b>KESEHATAN</b>	490	-
441	Pembinaan Kesehatan	491	-
442	Obat-Obatan	492	-
443	Penyakit Menular	493	-
444	Gizi	494	-
445	Rumah Sakit, Puskesmas, Pusling, Poliklinik	495	-
446	Tenaga Medis	496	-
447	Alat Medis Tradisional	497	-
448	Pengobatan Tradisional	498	-
449	-	499	-
500	<b>PEREKONOMIAN</b>	550	<b>PERHUBUNGAN</b>
501	Pengadaan Pangan	551	Perhubungan Darat
502	Pengadaan Sandang	552	Perhubungan Laut
503	Perizinan	553	Perhubungan Udara
504	-	554	Pos
505	-	555	Telekomunikasi
506	-	556	Pariwisata
507	-	557	Meteorologi
508	-	558	-
509	-	559	-
510	<b>PERDAGANGAN</b>	560	<b>TENAGA KERJA</b>
511	Pemasaran	561	Upah
512	Ekspor	562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI
513	Impor	563	Latihan Kerja
514	Perdagangan Antar Pulau	564	Tenaga Sukarela
515	Perdagangan Luar Negeri	565	Perselisihan Perburuhan
516	Pergudangan	566	Keselamatan Kerja
517	Aneka Urusan Perdagangan	567	Pemutusan Hubungan Kerja
518	Koperasi dan Urusan Menengah, Kecil, Mikro	568	Kesejahteraan Buruh

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

519	-	569	Tenaga Orang Asing
520	PERTANIAN	570	PERMODALAN
521	Tanaman Pangan	571	Modal Domestik
522	Kehutanan	572	Modal Asing
523	Perikanan	573	Modal Patungan
524	Peternakan	574	Pasar Uang dan Modal
525	Perkebunan	575	Saham
526	-	576	-
527	-	577	-
528	-	578	-
529	-	599	-
530	PERINDUSTRIAN	580	PERBANKKAN/MONETER
531	Industri Logam	581	Kredit
532	Industri Mesin/Elektronik	582	Inverstasi
533	Industri Kimia/Farmasi	583	Deposito
534	Industri Tekstil	584	Bank Pembangunan Daerah
535	Industri Makanan/Minuman	585	Ansuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas
536	Aneka Industri/Perusahaan	586	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transf
537	Aneka Kerajinan	587	Fiskal
538	Badan Usaha Milik Negara(BUMN)	588	Hutang Negara
539	Perusahaan Daerah/BUMD	589	Moneter
540	PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN	590	AGRARIA
541	Minyak Bumi	591	Tata Guna Tanah
542	Gas Bumi	592	<i>Ladreform</i>
543	Pertambangan Umum	593	Pengurusan Hak-hak Tanah
544	Panas Bumi	594	Pendaftaran Tanah
545	Aneka Tambang	595	Lahan Transmigrasi
546	Geologi	596	-
547	Laboratorium Sumber Daya Mineral (SDM)	597	-
548	Kesamudraan	598	-
549	Pesisir Pantai	599	-
600	PEKERJAAN UMUM	650	TATA KOTA
601	Tata Bangunan Kontruksi, Industri Kontruksi	651	Daerah Perdagangan
602	Kontraktor, Pemborong	652	Daerah Pemerintah
603	Arsitektur	653	Daerah Perumahan
604	Bahan Bangunan	654	Daerah Industri
605	Instalasi	655	Daerah Rekreasi
606	Kontruksi Pencegahan	656	Transportasi
607	-	657	Assainering
608	-	658	Kesehatan Lingkungan
609	-	659	-

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

610	PENGAIRAN	660	TATA LINGKUNGAN
611	Irigasi	661	Daerah Hutan
612	Polder	662	Daerah Pertanian/Perkebunan
613	Pasangan Surut	663	Daerah Permukiman
614	Pengendalian Sungai	664	Pusat Pertumbuhan
615	Pangaman Pantai	665	Transportasi
616	Air Tanah	666	-
617	-	667	-
618	-	668	-
619	-	669	-
620	JALAN	670	KETENAGAAN
621	Jalan Kota	671	Listrik
622	Jalan Luar Kota	672	Tenaga Air
623	-	673	Tenaga Minyak
624	-	674	Tenaga Gas
625	-	675	Tenaga Matahari
626	-	676	Tenaga Nuklir
627	-	677	Tenaga Panas Bumi
628	-	678	Tenaga Uap
629	-	679	Tenaga Lainnya
630	JEMBATAN	680	PERALATAN
631	Jembatan Pada Jalan Kota	681	-
632	Jembatan Pada Jalur Luar Kota	682	-
633	-	683	-
634	-	684	-
635	-	685	-
636	-	686	-
637	-	687	-
638	-	688	-
639	-	689	-
640	BANGUNAN	690	AIR MINUM
641	Bangunan Pemerintah	691	<i>Intake</i>
642	Bangunan Pendidikan	692	Transmisi Air Baku
643	Bangunan Rekreasi	693	Instalasi Pengolahan
644	Bangunan Perdagangan	694	Distribusi
645	Pembangunan Pelayanan Umum	695	-
646	Bangunan Peninggalan Sejarah	696	-
647	Bangunan Industri	697	-
648	Bangunan Tempat Tinggal	698	-
649	Elemen Bangunan	699	-

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

### 700 PENGAWASAN

#### Perincian Ketiga

700	PENGAWASAN	750	BIDANG PEREKONOMIAN
701	Bidang Urusan Dalam	751	Bidang Perdagangan
702	Bidang Peralatan	752	Bidang Pertanian
703	Bidang Kekayaan Daerah	753	Bidang Perindustrian
704	Bidang Perpust/Dok/Kearsipan/Sandi	754	Bidang Pertambangan/Kesamudraan
705	Bidang Perencanaan	755	Bidang Perhubungan
706	Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan	756	Bidang Tenaga Kerja
707	Bidang Penelitian	757	Bidang Permodalan
708	Bidang Konferensi	758	Bidang Perbankan/Moneter
709	Bidang Perjalanan Dinas	758	Bidang Agraria
710	BIDANG PEMERINTAHAN	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
711	Bidang Pemerintahan Pusat	761	Bidang Pengairan
712	Bidang Pemerintahan Provinsi	762	Bidang Jalan
713	Bidang Pemerintahan Kota/Kabupaten	763	Bidang Jembatan
714	Bidang Pemerintahan Desa	764	Bidang Bangunan
715	Bidang MPR/DPR	765	Bidang Tata Kota
716	Bidang DPR Provinsi	766	Bidang Lingkungan
717	Bidang DPR Kabupaten/Kota	767	Bidang Ketenagan
718	Bidang Hukum	768	Bidang Peralatan
719	Bidang Hubungan Luar Negeri	769	Bidang Air Minum
720	BIDANG POLITIK	770	-
721	Bidang Kepartaian	771	-
722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan	772	-
723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	773	-
724	Bidang Organisasi Pemuda	774	-
725	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	775	-
726	Bidang Organisasi Pemuda	776	-
727	Bidang Organisasi Umum	777	-
728	-	778	-
729	-	779	-
730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN	780	BIDANG KEPEGAWAIAN
731	Bidang Pertahanan	781	Bidang Pengadaan Pegawai
732	Bidang Kemiliteran	782	Bidang Mutasi Pegawai
733	Bidang Perlindungan Masyarakat	783	Bidang Kedudukan Pegaawai
734	Bidang Keamanan	784	Bidang Kesejahteraan Pegawai
735	Bidang Kejahatan	785	Bidang Cuti
736	Bidang Bencana	786	Bidang Penilaian
737	Bidang Kecelakaan	787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian
738	-	788	Bidang Pemberhentian Pegawai
739	-	789	Bidang Pendidikan Pegawai
740	BIDANG KESTRA	790	BIDANG KEUANGAN
741	Bidang Pembangunan Desa	791	Bidang Anggaran

## Pengertian Kewajiban

Bekas di peroleh

Term	Rencana Aksi	Indikator output	Saran output	Budget
				TW 1: 44 TW 2: 44

## Klasifikasi Karsipan Departemen Dalam Negeri

742	Bidang Pendidikan	792	Bidang Otoritasi
743	Bidang Kebudayaan	793	Bidang Verifikasi
744	Bidang Kesehatan	794	Bidang Pembukuan
745	Bidang Agama	795	Bidang Pembendahaan
746	Bidang Sosial	796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan
747	Bidang Kepedudukan	797	Bidang Pendapatan
748	Bidang Media Masa	798	-
749	-	799	Bidang Bendaharawan

## 800 KEPEGAWAIAN

### Perincian Ketiga

800	KEPEGAWAIAN	850	CUTI
801	-	851	Cuti Tahunan
802	-	852	Tuci Besar
803	-	853	Cuti Sakit
804	-	854	Cuti Hamil
805	-	855	Cuti Ibadah Haji
806	-	856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
807	-	857	Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting
808	-	858	-
809	-	859	-
810	PENGADAAN	860	PENILAIAN
811	Lamaran	861	Penghargaan
812	Pengujian Kesehatan	862	Hukuman
813	Pengangkatan Calon Pegawai	863	Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
814	Pengangkatan Tenaga Lepas	864	Ujian Dinas
815	-	865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
816	-	866	Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali
817	-	867	-
818	-	868	-
819	-	869	-
820	MUTASI	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
821	Pengangkatan	871	Formasi
822	Kenaikan Gaji Berkala	872	Bezetting
823	Kenaikan Pangkat/Pengangkatan	873	Registrasi
824	Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan	874	Daftar Riwayat Pekerjaan
825	Detasering dan Penempatan Kembali	875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
826	Penunjukan Tugas Belajar	876	Penggajian
827	Wajib Militer	877	Sumpah/Janji
828	Mutasi Pegawai Instansi Lain	878	Korps Kepegawaian
829	-	879	-

## Klasifikasi Karsipan Departemen Dalam Negeri

830	KEDUDUKAN	880	PEMBERHENTIAN
831	Perhitungan Masa Kerja	881	Permintaan Sendiri
832	Penyesuaian Pangkat/Gaji	882	Dengan Hak Pensiu
833	Penghargaan Ijazah/Penyesuaian	883	Karena Meninggal
834	Jenjang Pangkat/Eselonering	884	Alasan
835	-	885	Uang Pesangon
836	-	886	Uang Tunggu
837	-	887	Uang Sementara Waktu
838	-	888	Tidak Dengan Hormat
839	-	889	-
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI	890	PENDIDIKAN PEGAWAI
841	Tunjangan	891	Perencanaan
842	Dana	892	Pendidikan Reguler/Kader
843	Perawatan Kesehatan	893	Pendidikan Non Reguler
844	Koperasi/Distribusi	894	Pendidikan ke Luar Negeri
845	Perumahan/Tanah	895	Metode
846	Bantuan Sosial	896	Tenaga Pengajar
847	Rekreasi	897	Administrasi Pendidikan
848	Dispensasi	898	Fasilitas Belajar
849	-	899	Sarana
900	KEUANGAN	900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan	901	Nota Keuangan
902	APBN	902	APBN
903	APBD	903	APBD
904	Dana Alokasi Umum	904	Dana Alokasi Umum
905	Dana Alokasi Khusus	905	Dana Alokasi Khusus
906	-	906	-
907	-	907	-
908	-	908	-
809	-	809	-
910	ANGGARAN	910	ANGGARAN
911	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	911	Rencana Kerja Anggaran (RKA)
912	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	912	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
913	Dok. Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA)	913	Dok. Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA)
914	Surat Pencairan Dana (SPD)	914	Surat Pencairan Dana (SPD)
915	Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)	915	Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
916	Revisi	916	Revisi
917	-	917	-
918	-	918	-
819	-	819	-
920	OTORITASI/SKO	920	OTORITASI/SKO
921	Rutin	921	Rutin
950	PERBENDAHARAAN	950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Perbendaharaan & Gaji Rugi	951	Tuntutan Perbendaharaan & Gaji Rugi
952	Pengelola Keuangan Daerah	952	Pengelola Keuangan Daerah
953	Pengangkatan/Peng. PA & Bendahara Penge	953	Pengangkatan/Peng. PA & Bendahara Penge
954	Pengangkatan KPA & Bend. Peng. Pembantu	954	Pengangkatan KPA & Bend. Peng. Pembantu
955	Specimen Tanda Tangan	955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tagihan Piutang	956	Surat Tagihan Piutang
957	-	957	-
958	-	958	-
959	-	959	-
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Pemeriksaan Keuangan	961	Pemeriksaan Keuangan
962	Pemeriksaan Admin. Bendaharawan	962	Pemeriksaan Admin. Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan	963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	-	964	-
965	-	965	-
966	-	966	-
967	-	967	-
968	-	968	-
969	-	969	-
970	PENDAPATAN	970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan	971	Perimbangan Keuangan

## Klasifikasi Kearsipan Departemen Dalam Negeri

922	Pembangunan	972	Subsidi
923	SIAP	973	Pajak
924	Ralat SKO	974	Retribusi
925	-	975	Bea
926	-	976	Cukai
927	-	977	Pungutan
928	-	978	Bantuan Presiden, Menteri
829	-	979	Hibah
930	Verifikasi	980	Dana Bagi Hasil
931	SPM Rutin	981	Bantuan Keuangan
932	SPM Pembangunan	982	Bantuan Sosial
933	Penerimaan	983	Lain-lain Pendapatan
934	SPJ Rutin	984	-
935	SPJ Pembangunan	985	-
936	Nota Pemeriksaan	986	-
937	SP Pemindahan Pembukuan (SPPP)	987	-
938	-	988	-
839	-	989	-
940	PEMBUKUAN	990	PEMBELANJAAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	991	SKPP
942	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	992	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
943	Rekonsiliasi	993	Surat Perintah Membayar (SPM)
944	Realisasi Anggaran	994	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
945	Prognosis	995	-
946	Neraca	996	-
947	-	997	-
948	-	998	-
849	-	999	-